



# Implikasi Sosial Penundaan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Dinar Wahyuni<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akhirnya terjawab melalui keputusan Sidang Paripurna DPR. Kenaikan harga BBM ditunda per April 2012. Persoalannya kemudian adalah implikasi sosial dari penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi. Penundaan kenaikan harga BBM ternyata tidak membuat harga kebutuhan pokok yang sudah telanjur naik kembali turun, sementara Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) batal terealisasi. Masyarakat miskin semakin tertekan. Selain itu, telah terjadi penimbunan BBM di beberapa wilayah yang berimbas pada kelangkaan BBM bersubsidi. Dalam hal ini, rakyat miskin yang dirugikan, padahal mereka yang seharusnya paling berhak menerima subsidi. Penundaan juga berimplikasi pada kompensasi pemberian beasiswa pada siswa dari keluarga miskin.*

## Pendahuluan

Rencanapemerintahmenaikkanharga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu telah menimbulkan polemik dalam masyarakat. Menaikkan harga BBM memang pilihan yang berat. Di satu sisi, berbagai konflik sosial akan muncul seiring kenaikan harga BBM. Angka kemiskinan akan semakin meningkat karena kenaikan harga BBM selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif angkutan umum dan kenaikan tarif dasar listrik. Program kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dipersiapkan untuk mengatasi peningkatan angka kemiskinan pun menuai banyak kritik. Belajar dari pengalaman program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun sebelumnya, maka BLSM

pun diperkirakan akan menimbulkan permasalahan baru.

Di sisi lain, defisit APBN yang semakin besar akibat subsidi BBM menyebabkan beban yang ditanggung negara semakin berat. Dalam praktiknya, subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Rencana penghapusan subsidi BBM jenis premium dan solar memungkinkan Pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program yang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, mempertahankan subsidi akan menyebabkan semakin maraknya penyelundupan BBM ke luar negeri karena keuntungan yang diperoleh dari selisih harga di Indonesia dengan negara tetangga cukup besar.

<sup>\*)</sup> Calon Peneliti bidang Sosiologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: hi\_dins@yahoo.com

Melalui perdebatan panjang, diiringi aksi massa yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Sidang Paripurna DPR memutuskan harga BBM bersubsidi batal naik per 1 April 2012. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR, apabila harga minyak dunia di atas US\$120,75 per barel. Asumsi tersebut berdasarkan hitungan naiknya ICP rata-rata 15% selama enam bulan berlaku surut dengan asumsi harga minyak dunia US\$105 per barel. Persoalannya kemudian adalah bagaimana implikasi sosial pascapenundaan kenaikan harga BBM bersubsidi?

## **Kondisi BBM Nasional**

Subsidi BBM dimulai pada era pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1970. Pada masa itu, pemerintah mendorong masyarakat mengganti bahan bakar rumah tangga dari kayu ke minyak tanah dengan pertimbangan kerusakan alam akibat penebangan kayu yang berlebihan. Harga minyak tanah disubsidi pemerintah karena saat itu harga minyak dunia mencapai US\$13 per barel akibat krisis politik di Timur Tengah. Bersamaan dengan itu, industri otomotif juga mulai berkembang di Indonesia. Secara otomatis penggunaan premium dan solar meningkat. Pemerintah berupaya memberikan subsidi BBM kendaraan bermotor untuk meningkatkan produktivitas dunia industri.

Dalam perkembangannya, pengguna kendaraan bermotor semakin bertambah setiap tahunnya sehingga konsumsi BBM juga meningkat. Saat ini konsumsi minyak mentah sudah mencapai 1,3 juta barel per hari. Kondisi itu berbanding terbalik dengan produksi minyak mentah yang terus mengalami penurunan. Tidak adanya eksplorasi baru di Indonesia mengakibatkan laju produksi minyak hanya mencapai 900.000 barel per hari, berbeda jauh bila dibandingkan tahun 1970 di mana produksi minyak mentah bisa mencapai 1,5 juta barel per hari. Karena itu, pemerintah perlu mengimpor minyak mentah dari negara lain dengan pasaran harga internasional yang terus meningkat di atas asumsi APBN Perubahan 2012 yang dipatok sebesar

US\$105 per barel. Sementara rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai US\$122 per barel dalam tiga bulan pertama tahun ini. Karena harga yang begitu tinggi tersebut, pemerintah merasa perlu untuk memberikan subsidi demi meringankan beban masyarakat.

## **Implikasi Sosial Penundaan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi**

Kenaikan harga BBM selalu menimbulkan efek domino. Kenaikan harga kebutuhan pokok disusul kenaikan tarif dasar listrik dan tarif transportasi merupakan dampak turunan yang muncul apabila harga BBM naik. Masyarakat diliputi ketakutan dan kepanikan walaupun pada awalnya kenaikan tersebut baru berupa wacana. Maraknya aksi massa menolak kenaikan harga BBM merupakan salah satu reaksi masyarakat yang dengan mudah terrekam oleh media massa dan diikuti oleh kelompok massa yang lain. Di Makassar, misalnya, massa melakukan penjarahan SPBU, menyabotase tabung gas, membakar mobil dan menutup akses jalan utama. Pusat pertokoan dan perkantoran yang berada di pusat kota Makassar lumpuh. Begitu juga di Bima, aksi massa berujung bentrok dan satu mahasiswa menjadi korban penembakan.

Aksi tersebut di satu sisi merupakan ungkapan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat menuntut kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, aksi massa yang berlangsung anarki, pada gilirannya justru melumpuhkan perekonomian sebagian masyarakat. Belum lagi, masyarakat yang menjadi korban dari aksi massa baik fisik maupun kerusakan harta benda.

Keputusan Sidang Paripurna DPR yang menunda kenaikan harga BBM bersubsidi menyebabkan paket kompensasi kenaikan harga BBM ditunda pelaksanaannya. Salah satu kompensasi kenaikan BBM bersubsidi adalah BLSM. BLSM rencananya merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang

kebutuhan pokok sebagai dampak langsung kenaikan harga BBM. Setiap rumah tangga sasaran akan menerima dana sebesar Rp150.000 per bulan selama 9 bulan, dan penyaluran akan dilakukan per 3 bulan.

Namun yang terjadi adalah harga kebutuhan pokok sudah telanjur naik sebelum BLSM dapat dinikmati masyarakat. Kenaikan harga dipasar tradisional mencapai 10 sampai 15 persen. Ketika harga naik, perlu waktu sekitar dua sampai tiga bulan untuk dapat menstabilkan kembali, salah satunya adalah dengan digalakkannya operasi pasar oleh Kementerian Perdagangan.

Selain kenaikan harga barang kebutuhan pokok, penimbunan BBM juga terjadi di beberapa wilayah. Tindakan tersebut sudah dimulai sejak isu kenaikan harga BBM digulirkan. Perbedaan harga membuka peluang tindakan penyelundupan. Selama bulan Maret terungkap 344 kasus penimbunan BBM. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan Februari yang masih 12 kasus. Namun, ketika harga BBM ditunda kenaikannya, aksi penimbunan BBM masih terjadi. Di Kecamatan Sorawolio, Sulawesi Tenggara, misalnya, ratusan ibu rumah tangga harus mengantri di depan sebuah pangkalan minyak tanah sejak ditundanya rencana kenaikan harga BBM. Masyarakat hanya mendapat jatah minyak tanah 20 liter dengan harga Rp4.000 per liter. Jatah 20 liter tidak mampu mencukupi kebutuhan warga selama sebulan, sementara kayu bakar juga tidak bisa dimanfaatkan akibat musim hujan. Sekali lagi, rakyat kecil akan menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal mereka yang seharusnya berhak menerima subsidi.

Penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi juga menyebabkan kompensasi pemberian beasiswa pada siswa yang berasal dari keluarga miskin mengalami perubahan. Salah satu program bidang sosial yang akan merasakan dampak dari penundaan kenaikan tersebut adalah Program Subsidi Siswa Miskin (SSM). SSM merupakan program tetap pemerintah untuk memberikan bantuan biaya operasional bagi siswa yang tidak mampu. Akibat penundaan, maka program SSM ditunda penambahan jumlah penerimanya. Awalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan kompensasi

kenaikan harga BBM bersubsidi berupa penambahan cakupan penerima program SSM sebagai antisipasi meningkatnya angka siswa putus sekolah setelah kenaikan harga BBM bersubsidi. Penambahan tersebut rencananya dibagi dua, yaitu kenaikan besaran *cost* dan penambahan jumlah penerima dari sekitar 6 juta siswa menjadi 14 juta siswa atau setara dengan 12 persen dari jumlah siswa miskin di Indonesia. Untuk sekolah dasar, pada awalnya Rp360 ribu per anak per tahun, naik menjadi Rp450 ribu per anak per tahun. Sementara jumlah penerima sekitar 3 juta siswa. Jenjang SMP, dari Rp550 ribu per anak per tahun menjadi Rp750 ribu per anak per tahun dan jenjang SMA yang semula Rp780 ribu per anak per tahun menjadi Rp1 juta per anak per tahun. Dengan adanya penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka kenaikan hanya terjadi pada besaran unit *cost* saja, sedangkan penambahan jumlah penerima ditunda.

Berdasarkan perbandingan paling tidak dua program subsidi yang harus ditunda penyelenggaraannya dan kemudian justru berdampak negatif bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah seyogyanya berupaya menekan angka kemiskinan. Program BLSM yang direncanakan sebelumnya lebih baik dialihkan ke program padat karya yang bisa memberikan lapangan pekerjaan jangka panjang. Pengalaman dari program BLT sebelumnya, bersifat sementara dan menimbulkan gaya hidup konsumtif. Apabila dibiarkan, hal tersebut bisa melahirkan kemiskinan kultural, yaitu masyarakat bermental suka meminta dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah.

Menurut Elwood, ada empat syarat untuk menghapus kemiskinan, yaitu ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program bagi kaum miskin yang dirancang dengan seksama. Di sini keberpihakan kekuatan politik, sosial dan ekonomi pada rakyat dibutuhkan sehingga orang miskin tidak hanya dicatat sebagai data semata. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan program-program yang bersifat sementara. Masyarakat memerlukan perluasan lapangan kerja yang dapat menjamin penghasilan dan mendongkrak daya beli.

## Penutup

Penundaan kenaikan BBM memang menimbulkan implikasi luas bagi masyarakat, mulai dari tidak terealisasinya BLSM sementara harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik, penimbunan BBM yang berdampak kelangkaan BBM di beberapa wilayah, sampai kompensasi pemberian beasiswa pada siswa yang berasal dari keluarga miskin mengalami perubahan dalam penambahan jumlah penerima program SSM. Stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat harus menjadi prioritas karena berhubungan dengan daya beli masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus menggalakkan operasi pasar guna menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Kebijakan Pemerintah untuk menggulirkan program berbentuk *charity* di masa yang akan datang harus dirancang seksama agar persoalan yang muncul seperti program BLT dapat dicegah. DPR perlu mendorong dan mendukung Pemerintah dalam upaya mencari solusi terbaik untuk membantu masyarakat miskin agar dapat hidup layak. Pemerintah harus membina dan mendampingi masyarakat dalam prospek jangka panjang sehingga setelah BLSM selesai, kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Selain itu, ada upaya peningkatan kapasitas dan tanggung jawab masyarakat miskin dalam mengelola dana bantuan tersebut.

Jika permasalahannya adalah risiko defisit anggaran APBN Perubahan 2012 yang meningkat, Pemerintah seharusnya mulai menggali penerimaan dari sektor selain perminyakan, seperti pertambangan, mendorong industri dan sektor riil serta meningkatkan investasi. Gerakan hemat nasional yang dicanangkan pemerintah harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Diharapkan ke depan, pemakaian BBM bisa dibatasi, misalnya konversi BBM ke gas, dengan persiapan yang matang tentunya, baik dari segi standarisasi keamanan alat konversi maupun kesiapan infrastruktur di lapangan. Di sini diperlukan peran DPR dalam fungsi pengawasannya untuk memastikan pelaksanaan berbagai program berjalan sesuai ketentuan.

## Rujukan:

1. BLT, Infrastruktur, dan Kemiskinan, *Suara Pembaharuan*, 22 Maret 2012.
2. Dampak Kenaikan Harga BBM: Paket Kompensasi BBM Disepakati, *Kompas*, 29 Maret 2012.
3. Kebijakan Publik Dipertanyakan, *Kompas*, 2 April 2012.
4. Konflik Iran, Bisingnya Eropa, dan Implikasi BBM, *Republika*, 2 April 2012.
5. Minyak 121 Dollar, BBM Naik, *Republika*, 2 April 2012.
6. Syahra, Rusdi, *Bantuan Langsung Sementara sebagai Kompensasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak*, Bahan Diskusi Internal Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 22 Maret 2012.
7. "344 Kasus Penimbunan BBM, 439 Tersangka," <http://www.jpnn.com/read/2012/04/03/123031/344-Kasus-Penimbunan-BBM,-439-Tersangka->, diakses 9 April 2012.
8. "Kenaikan Harga BBM Hanya Akan Menyengsarakan Rakyat," <http://www.prp-indonesia.org/2012/kenaikan-harga-bbm-hanya-akan-menyengsarakan-rakyat>, diakses 6 April 2012.
9. "Konsumsi BBM Subsidi Melonjak," <http://www.indopos.co.id/index.php/index-berita-bisnis-dan-investasi/61-Bisnis/9788-konsumsi-bbm-subsidi-melonjak.html>, diakses 8 April 2012.
10. "Mari Menghitung Harga Bahan Bakar Minyak Secara Sederhana," <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/03/28/mari-menghitung-harga-bahan-bakar-minyak-secara-sederhana/>, diakses 6 April 2012.
11. "Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Capai 98 persen, Subsidi Siswa Miskin Tetap Diberikan," <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/87483>, diakses 5 April 2012.